

# BERPOLITIK TANPA KEBERANIAN<sup>1</sup>

Oleh Nurcholish Madjid

Oposisi, seringkali dianggap satu kata yang ikut serta menghantui peta politik negeri ini. Padahal, oposisi itu, hanyalah satu diksi yang diambil dari perbendaharaan kata modern. Di sisi yang lain, kita pun memungut beberapa kata modern untuk beberapa nama, seperti; republik, presiden, dan parlemen. Untuk itulah, Nurcholish Madjid, seorang cendekiawan Muslim, mempersoalkan, mengapa kita hams menolak istilah oposisi? Sebab hakekat dari oposisi itu adalah *check and balance*, pengawasan dan perimbangan. *Media Indonesia* melalui Budiman S. Hartoyo melakukan wawancara dengan Nurcholish Madjid di kediamannya.

**Oposisi, secara teori, adalah bentuk keikutsertaan masyarakat yang dipimpin berupa keikutsertaan mengoreksi. Tapi kenyataan sehari-hari apa yang Cak Nur lihat?**

Ya, belum. PPP dan PDI macet. Seperti yang saya ungkapkan sebelumnya dan diakui kedua partai itu, bahwa mereka adalah pelengkap penderita. Jadi dimulai dengan kenyataan bahwa partai-partai itu tidak berfungsi. Tapi itu karena kedudukan mereka yang canggung (akibat) disubsidi dan sebagainya. Selain disubsidi, tak

---

<sup>1</sup> *Media Indonesia*, “Bagaimana Bisa Berpolitik Tanpa Keberanian”, Minggu, 17 September 1995. Pewawancara Budiman S. Hartoyo. Selama sebulan, setelah wawancara ini dimuat, *Media Indonesia* Edisi Minggu, “diistirahatkan”.

boleh disebut partai oposisi. Tapi disebut partai pemerintah juga tidak, karena tak ikut memerintah. Sementara Golkar selalu mengatakan *single majority*. Kalau ada mayoritas, berarti ada minoritas. *Lho*, (partai) minoritas itu *kan* oposisi (tertawa).

**Karena undang-undang kita tak mengakui oposisi, ada yang menganggap sebaiknya partai politik minoritas menjadi “critical party”, partisipan yang kritis.**

Begini. Kalau ada trauma terhadap oposisi, harus dimengerti. Karena memang ada pengalaman yang pahit sekali sekitar tahun 1950-an, saat banyak partai oposisi. Yakni, suatu kelompok yang dengan gaya yang sengit selalu ingin menjatuhkan pemerintah. Ya, waktu itu kita belum dewasa. Banyak masyarakat yang buta huruf. *Nah*, pengalaman ini membuat anggapan oposisi tidak cocok dengan kondisi kita. Tapi sebetulnya, partai oposisi itu sebenarnya adalah *check and balance* (pengawasan dan perimbangan) yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia. Bukan hanya dalam masyarakat Minang. Tapi juga Jawa. *Kan* ada tradisi *mepe* (demonstrasi berjemur di siang hari). Oposisi *kan* cuma istilah modern. Mengapa kita harus takut menggunakannya? Apalagi kita sudah meminjam istilah modern lainnya, seperti menamakan negara kita republik, kepala negara kita presiden, parlemen dan sebagainya. Mengapa kita harus menolak istilah oposisi? Begitu juga dengan “critical party”. Taruhlah kita tak boleh menggunakan istilah oposisi. Tapi mereka (partai politik) tetap harus menjadi kekuatan pengawas dan pengimbang.

**Dilihat dari segi personil parpol, baik PPP maupun PDI, bagaimana? Apakah sudah cukup berpotensi untuk melakukan *check and balance* itu?**

Kemampuan itu sering tercipta karena kesempatan. Masalahnya, kesempatan itu tak selalu diberikan tapi harus diciptakan sendiri.

*Nah*, seringkali kita meremehkan orang pada saat ia belum melakukannya. Seperti terjadi pada Pak Harto 30 tahun silam. Orang bertanya: apa bisa (beliau memimpin negara). Ternyata, ya sangat bisa (tertawa). *Nah*, Buya (Ismail Hasan Metareum) misalnya. Orangnya *kan* halus begitu. Tapi *toh* bisa juga meledak. Bahkan, ketika isu parpol yang digencet mencuat belakangan, sebenarnya ini isu lama. Tapi *toh* bisa juga meledak. Tapi yang menarik, bahwa hal itu Buya yang mengatakan (tertawa). Jadi jangan meremehkan. Tapi mari kita ciptakan kondisi supaya orang berani dan memunculkan potensinya. Selain itu, ini masalah mentalitas saja. Yakni, bagaimana Buya atau Megawati melepaskan diri dari stigma (cap) partainya. Contohnya, Kwik Kian Gie. Orang boleh bilang dia Cina. Tapi dia tidak peduli. Dia terus saja. Dan sekarang jelas ia tampak sebagai seorang yang benar-benar nasionalis.

**Apakah oposisi tidak mengecilkan arti “musyawarah untuk mufakat?”**

Kalau menurut (sejarawan) Taufik Abdullah, ini masalah hegemoni makna. Musyawarah-mufakat itu seperti sekarang ini. Istilah ini berasal dari orang-orang Minang. Mereka yang pertama kali menggunakannya. Tapi musyawarah-mufakat dalam masyarakat Minang, tidak berarti konsensus. Mufakat berasal dari *muwâfaqah* yang berarti persetujuan. Artinya, laksanakanlah apa yang disetujui. Prosesnya bisa terjadi melalui voting. Kalau konsensus itu *ijmâ’*. Jadi keliru. Dalam mufakat bisa tetap berbeda pendapat, namun tetap dilaksanakan persetujuan biar pun melalui voting. Bukan seperti sekarang ini.

**Dalam sejarah republik ini, baik dalam Demokrasi Terpimpin maupun yang sekarang ini, oposisi haram. Nanti kalau ada pun, akan dituduh liberal?**

Itu proses saja. Kini, dalam ekonomi kita melakukan berbagai deregulasi. Ide-ide semacam ini, di masa lalu disebut liberal. Tapi

sekarang diterima. Malah nanti pada tahun 2002, kita akan liberal sepenuhnya. *Nah*, kalau nanti, politiknya masih tidak demikian, maka jadinya tidak simetris. Tidak sinkron, sehingga dapat menimbulkan berbagai krisis. Singapura jangan dijadikan contoh. Negara itu *kan* hanya sebesar Jakarta, terbilang kecil. Karena itu bisa saja Singapura maju dengan cara-cara yang khas Lee Kuan Yew. Kalau kita yang luasnya dari Sabang ke Merauke ini mengikuti, bisa meledak. Jadi sebaiknya kita mencontoh bangsa-bangsa yang cenderung federal itu. Mungkin kita tak menerapkan federalisme, tapi otonomi daerah harus jauh lebih besar ketimbang sekarang. Sebetulnya, untuk kesekian kalinya saya katakan: ide (oposisi) ini bukan gagasan orisinal saya. Diskursus (silang pendapat) di antara kita, saya hanya mengangkatnya ke permukaannya. Dan sebagai gejala, kita pun sudah melakukan.

### Contohnya?

Contohnya: pikiran mengenai otonomi daerah lebih besar. Buruh sudah mulai demonstrasi. Lalu berbagai deregulasi. Juga, untuk tahun 1996, kegiatan politik tak perlu izin. Justru pesta yang perlu izin, karena dapat mengganggu orang banyak. Seperti yang menutup jalan. Jadi sebetulnya sudah banyak antisipasi yang sehat. Seperti berbagai statemen yang dilontarkan (Menko Polkam) Soesilo Soedarman belakangan ini. Banyak yang bagus sekali.

### Misalnya?

Ya, seperti yang dilontarkannya pada Seminar Nasional Sesko ABRI beberapa waktu silam: bahwa sekarang ini harus ada sikap yang positif terhadap aspirasi dari bawah. Begitu juga dengan pernyataan-pernyataan (Menhankam) Edi Sudrajat. *Wah*, demokratis sekali. Misalnya, orang yang naik ke atas tak boleh hanya mengandalkan kedekatan pada atasan. Ya, soal *favouritism*. Harus berdasarkan kemampuan. *Nah*, bagaimana kita bisa mempromosikan orang

berdasarkan kemampuan tanpa adanya demokrasi? Tak mungkin *kan*? Sekarang ini orang naik karena *favouritism*. Dan kita tak menyalahkan proses yang barangkali memang menghendaki apa yang kita alami. Cuma kita menyalahkan cara berpikir bahwa hal-hal yang merupakan proses itu bersifat permanen. Ini salah. Misalnya, seperti yang dialami Golkar sekarang ini *kan* proses penyelesaian suatu persoalan pada waktu itu. Yang kita tahu otaknya adalah almarhum Ali Moertopo. Dengan segala hormat kepada beliau, karena memang idenya berhasil. Tapi *kan* salah bahwa semua itu solusi permanen. Kita bisa terjebak pada ilusi yang berbahaya. Keadaan sekarang ini semakin normal, jadi yang diperlukan aturan-aturan yang semakin normal.

Lalu begini, ya. Ini sudah sering saya kemukakan. Yakni, selama 50 tahun ini kita baru punya dua presiden: Soekarno dan Soeharto, yang juga berfungsi sebagai Bapak Bangsa. Yang *get things done*. Yang membuat persoalan dapat diselesaikan. Secara formal, boleh diklaim bahwa semua proses pengambilan keputusan di negara kita selama Orde Baru adalah secara konstitusional. Tapi siapa yang tidak tahu bahwa keputusan akhir tetap di tangan Pak Harto (tertawa). *Lho*, nanti, setelah Pak Harto, pertama kalinya kita akan mempunyai presiden yang *primus inter pares*. Yang pertama dari yang sama: orang biasa saja. Sehingga ini berarti masalah negara akan lebih banyak dipertaruhkan pada struktur. Bukan pada pribadi lagi. *Nah*, berbicara mengenai struktur, berarti kita berbicara mengenai kekuatan-kekuatan politik yang berfungsi. Seperti partai, parlemen, pers. Karena itu struktur ini harus dimulai dengan kebebasan-kebebasan asasi. Seperti kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat. Ini seperti pilihan bepergian. Bisa naik pesawat terbang, kapal laut, mobil atau kereta api. Yang paling berstruktur adalah kereta api. Karena siapa pun masinisnya, tetap saja keretanya berjalan mengikuti rel. Tidak bisa dibelokkan semaunya masinis. Jadi yang lebih menentukan struktur. *Nah* kita harus menciptakan struktur (politik) dari sekarang. Jangan lagi tergantung pada pribadi seseorang. Dengan demikian masalah

suksesi menjadi tidak penting. Siapa yang menggantikan Pak Harto, tidak menjadi soal lagi. Tidak perlu ribut dan panik. Memang, bukannya tak ada negatifnya. Seperti di Amerika, orang bisa jadi tak peduli pada politik. Ya, siapa saja yang menjadi presiden, keadaannya kurang lebih sama saja. Karena sudah ada strukturnya yang lebih menentukan.

**Tapi bukankah Pak Harto sudah menegaskan bahwa mekanismenya ada?**

Pak Harto betul. Tapi ada saja kemungkinan perkembangan di masa depan. Berkembang bukan dalam arti perubahan. Yang dimaksudkan mekanisme oleh Pak Harto itu bukan seperti di AS, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Tapi meski dipilih MPR, suatu interpretasi logisnya adalah menjelang pemilihan MPR, dalam kampanye pemilu, orang sudah mulai mempunyai gambaran siapa yang bakal jadi presiden. Karikturnya, meskipun masinis sedikit menentukan, *toh* kita tak akan menyerahkan pekerjaan itu pada orang gila (terbahak). Selain itu, dengan syarat *primus inter pares* pada presiden pasca Pak Harto, berarti harus ada alternatif-alternatif. *Nah*, alternatif ini disediakan partai-partai politik. Mereka harus melatih diri untuk menjadi komponen demokrasi yang efektif. Jangan *absurd*: (menyelenggarakan) kampanye, tapi kalau ditanya siapa calon presidennya, ya itu juga. Bagaimana ini.

**Mungkin karena tidak ada keberanian.**

Ya, itulah. Berpolitik tapi tidak punya keberanian, bagaimana? Ismail Hasan Metareum atau Megawati, misalnya. Mereka harus berani bilang: pilih PDI atau PPP, saya presidennya. Ini program saya. Begitu, dong. Kalau takut, itu karena takut pada bayangan saja.

**Nanti dianggap melangkahi. “*Ewuh pakewuh*” dan soal budaya.**

*Nah, soal budaya. Yang disebut Indonesia itu bukan gabungan puncak-puncak budaya tertentu. Tapi hasil proses dinamik dari take and give dan osmose budaya, dan itu paling banyak terjadi di Jakarta. Jadi jati diri Indonesia itu siapa? Karena paling banyak menguasai birokrasi orang Jawa memang dominan. Tapi untuk mengklaim Jawa sebagai budaya Indonesia, that is very very wrong. Apalagi kita memilih bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Bukan bahasa Jawa, meski jauh lebih canggih. Bahasa Melayu adalah bahasa pantai yang tak mengenal hirarki, lebih terhuka, dinamis dan kosmopolitan. Artinya, karena bahasa adalah cermin budaya, budaya Indonesia yang berciri lebih coastal culture ketimbang inland culture, sebetulnya lebih siap menerima demokrasi. [❖]*